PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT KINERJA

818



INSPEKTORAT KOTA BIMA

Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Thn 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2. UU No. 1 Thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. UU No. 15 Thn 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 24 Thn 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 7. PP No. 58 Thn 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. PP No. 79 Thn 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9. PP No. 08 Thn 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
- 10. PP No. 39 Thn 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 11. PP No. 38 Thn 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern;
- 13. PP No. 71 Thn 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 14. PP 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4);
- Peraturan WaliKota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima;

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Auditor, P2UPD dan staf pelaksana yang telah mengikuti pelatihan di bidang pengawasan.
- 2. Memahaml tentang kriteria pengawasan.
- 3. Memahami tentang entitas/objek pemeriksaan
- 4. Tim Pemeriksa berjumlah minimal 3 (tlga) orang terdiri dari 1 (Satu) Ketua dan 2 (dua) Anggota.

0	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Ketua Tim	Anggota	Obrik	Kelengkapan	Waktu	Output	Net
1	Perencanaan penugasan (susun tim, pengumpulan data awal, penetapan sasaran pemeriksaan, penyusunan PKP dan penerbitan ST)		Tidak	—				TS, draft ST & cost-sheet & PKP	1 hari	ST yg disetujui	
2	Survey Pendahuluan - Entry meeting					menolak/menur	~	ST dan PKP	1 jam	ST terbit BA entry meeting	Jika menunda/ menolak/tidak memberikan data, SKPD membuat BA
	- Pengumpulan data awal				Ya		Ya	Data obrik dan KKP Pendahuluan	1 hari	Data LHP & TAO (ternuan sementara)	
3	Penilaian SPI (penelaahan dan analisis data)						Ya	Data obrik dan KKP Penilaian SPI	9 hari (minim al)	Data LHP, FAO (temuan) dan PKP rinci	Waktu = tergantung besaran ruang lingkup obrik
4	Pemeriksaan rinci (pengembangan temuan)		Tidak	Ya		T	Z	KKPrinci	3 hari (minim al)	Notisi/P2HP	Waktu = tergantung PKP rinci
5	Penyampaian notisi/P2HP dilengkapi BA exit meeting						1	Notisi/P2HP	5,5 jam	BA Exit Meeting	
6	Tanggapan notisi/P2HP dari obrik				1	4		Notisi/P2HP	5 hari (maksi mal)	Tanggapan Obrik	Perhit. Waktu dr penyerahan notisi
7	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan					1 • 10••1), **a1	Notisi, tanggapan, KKP dan form PM	5 hari (maksi mal)	Konsep LHP	Perhit. Waktu dr tanggapan diterima

Kota Bima, ~2 Maret 2018

Inspektur &

Pembina Itama Muda IV

NIP. 19580330 198503 1 006

3 1